



## Analisis Peran Kebijakan Hilirisasi Industri dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Fajrin Puspa Rini<sup>1\*</sup>, Tutut Faraswati<sup>2</sup>, Alin Rosidah Solihati<sup>3</sup>, Aisyah Nur Khasanah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [fajrinps04@gmail.com](mailto:fajrinps04@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [tutufaraswati09@gmail.com](mailto:tutufaraswati09@gmail.com)<sup>2</sup>, [nalinalin486@gmail.com](mailto:nalinalin486@gmail.com)<sup>3</sup>, [aisyahnkhasanah586@gmail.com](mailto:aisyahnkhasanah586@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [fajrinps04@gmail.com](mailto:fajrinps04@gmail.com)

**Abstract.** *The downstreaming of natural resources has emerged as a strategic policy implemented by the Coordinating Ministry for Economic Affairs to strengthen Indonesia's economic independence and reduce reliance on raw commodity exports. Grounded in the philosophical foundation of Pancasila, this policy emphasizes the principles of economic equality, national sovereignty, and sustainability, in line with the overarching goals of national development. This study aims to analyze the role of industrial downstreaming policies in enhancing national economic self-reliance through the integration of Pancasila values. Substantively, downstreaming increases value-added production, boosts domestic investment, and facilitates job creation, particularly in the mineral processing and agro-industrial sectors. Moreover, the policy contributes to reducing economic vulnerability to global market fluctuations and aligns with the Pancasila principles of social justice and collective welfare. However, several challenges remain, including infrastructure readiness, environmental sustainability, and inclusive participation of small and medium enterprises (SMEs). The research indicates that the industrial downstream sector, as regulated by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, plays a crucial role in realizing national economic autonomy, requiring its implementation to be aligned with Pancasila principles in order to balance economic progress with equity and sustainability.*

**Keywords:** *Industrial downstreaming; kemenko perekonomian; economic independence; Pancasila; National development.*

**Abstrak.** Hilirisasi sumber daya alam telah muncul sebagai kebijakan strategis yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Berlandaskan pada dasar filosofis Pancasila, kebijakan tersebut menggarisbawahi prinsip-prinsip kesetaraan ekonomi, kedaulatan nasional, dan keberlanjutan, selaras dengan tujuan menyeluruh pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan hilirisasi industri dalam meningkatkan kemandirian ekonomi nasional melalui integrasi nilai-nilai Pancasila. Hilirisasi secara substansif meningkatkan nilai tambah produksi, meningkatkan investasi domestik, dan memfasilitasi penciptaan lapangan kerja, terutama dalam domain pemrosesan mineral dan agroindustri. Selain itu, kebijakan ini berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Namun, tantangan masih ada, termasuk kesiapan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi inklusif dari usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian menunjukkan bahwa sektor hilir industri, sebagaimana diatur oleh Kementerian Perekonomian, sangat penting dalam mewujudkan otonomi ekonomi nasional, mengharuskan pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan kesetaraan dan keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa sektor hilir industri, sebagaimana diatur oleh Kementerian Perekonomian, sangat penting dalam mewujudkan otonomi ekonomi nasional, mengharuskan pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan kesetaraan dan keberlanjutan.

**Kata kunci:** Hilirisasi industri; Kemenko Perekonomian; kemandirian ekonomi; Pancasila; pembangunan nasional.

### 1. PENDAHULUAN

Reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak hanya mempercepat proses transisi menuju status negara berpendapatan tinggi, tetapi juga menghindarkan Indonesia dari ancaman *middle income trap*. Reformasi ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan

berkeadilan sosial. Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi nasional tidak hanya diarahkan pada peningkatan output dan efisiensi pasar, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Hal terakhir yang perlu digarisbawahi adalah bahwa langkah-langkah strategis tersebut memerlukan pra syarat terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sebagai *elements of continuity* dalam mendukung perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkelanjutan (Juhro, 2016). Ekonomi Pancasila merupakan aturan main bagi kehidupan ekonomi Indonesia dengan menghubungkan antara pelaku ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Salim, 2019).

Sistem ekonomi kapitalisme negara bisa diterapkan sebagai alternatif system ekonomi kerakyatan (Hidayat et al., 2025). Demi kelangsungan eksistensi Pancasila pada kehidupan negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk lebih mendalami dan mempraktikkan kembali nilai-nilai Pancasila secara mendalam pada berbagai lini kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perekonomian (Marsudi & Purbasari, 2022). Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Indonesia harus mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan, membangun kehandalan sektor industri, serta memperkuat ketahanan di bidang energi dan pangan. Di samping itu, penguatan struktur pembiayaan perekonomian, pengembangan kegiatan ekonomi inklusif, serta peningkatan kemampuan modal pembangunan menjadi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi nasional.

Langkah-langkah strategis tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya prasyarat fundamental, yakni terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua hal ini berfungsi sebagai *elements of continuity* dalam mendukung perencanaan dan implementasi berbagai program pembangunan jangka panjang. Stabilitas yang dimaksud mencakup stabilitas nilai tukar, inflasi, serta kestabilan sistem perbankan dan pasar modal, yang kesemuanya berperan dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan kegiatan produktif masyarakat. Tanpa stabilitas makroekonomi, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi berisiko menghadapi berbagai tekanan eksternal maupun internal yang dapat menghambat efektivitasnya (ISEI, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan hilirisasi industri menjadi salah satu instrumen strategis utama yang diusung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Hilirisasi diposisikan sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam

nasional. Menurut (Akhmadi, 2024) fokus terhadap hilirisasi muncul karena besarnya potensi nilai tambah yang dapat diperoleh dari proses pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, sebelum produk tersebut diekspor. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar yang menjadi identitas bangsa, yakni Pancasila. Nilai-nilai seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedaulatan ekonomi, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menyediakan kerangka normatif yang membimbing arah kebijakan agar tidak semata berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat (Atqiya, Nasoha, Sari, et al., 2024).

Kewarganegaraan tidak hanya menghubungkan individu dengan identitas hukum nasional tetapi juga mempengaruhi hak-hak politik, sosial, dan ekonomi mereka (Nasoha et al., 2024). Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, pembangunan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan, melainkan juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian bangsa melalui mekanisme ekonomi yang berakar pada nilai kemanusiaan dan gotong royong (Ayunda et al., 2022).

Data menunjukkan bahwa individu dengan kewarganegaraan penuh umumnya memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang layak dan pendidikan berkualitas. Sebaliknya, mereka dengan kewarganegaraan terbatas atau tanpa kewarganegaraan sering kali terjebak dalam pekerjaan informal atau berpendapatan rendah dan memiliki akses terbatas ke pendidikan dan layanan Kesehatan (Nasoha et al., 2024).

Beberapa kajian sebelumnya telah menekankan pentingnya hilirisasi industri di tingkat regional sebagai elemen strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan mendistribusikan pembangunan secara lebih merata. Sebagai ilustrasi, penelitian tentang industri karet di Sumatera Selatan dalam lingkup Zona Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi dapat memperlebar fondasi ekonomi setempat serta menghasilkan peluang kerja tambahan. Di sisi lain, studi oleh (Azizah et al., 2023) yang berjudul *“Determining Leading Industries in Optimizing Downstream Potential of North Sumatra Province: an Input-Output Approach”* menyatakan bahwa penentuan sektor prioritas untuk hilirisasi berpotensi menjadi penggerak utama revitalisasi ekonomi wilayah, menguatkan hubungan antarindustri dalam negeri (inter-industry linkage), dan menambah peran industri dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun demikian, literatur akademik masih belum cukup mendalam dalam menganalisis secara

terstruktur kontribusi kebijakan hilirisasi nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap pencapaian kemandirian ekonomi bangsa dari sudut pandang Ekonomi Pancasila. Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi makro dan kebijakan sektor hilir. Integrasi ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas semata, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di tengah tekanan globalisasi ekonomi dan kompetisi antarnegara, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menjadi panduan moral dan etis bagi pengambil kebijakan agar arah pembangunan ekonomi tetap berpihak kepada kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Kedua, studi ini bertujuan untuk menutupi kesenjangan dalam literatur terkait keefektifan kebijakan hilirisasi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Walaupun hilirisasi telah menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan ekonomi selama satu dekade belakangan, penelitian empiris yang mengukur tingkat kontribusi kebijakan ini terhadap resiliensi dan otonomi ekonomi bangsa masih belum memadai. Pada masa ketidakstabilan global, seperti variasi harga bahan baku dan pergeseran kondisi ekonomi dunia, hilirisasi memiliki potensi sebagai pendekatan adaptif yang mendukung kelangsungan ekonomi dalam negeri.

Ketiga, studi ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris dan evaluasi kebijakan yang bisa menjadi panduan bagi para perumus kebijakan di masa depan. Melalui pemeriksaan praktik hilirisasi berdasarkan prinsip-prinsip ideologis bangsa, terutama Pancasila, penelitian ini akan berkontribusi pada pemikiran strategis untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tidak hanya efektif, melainkan juga berorientasi kuat pada aspek moral dan sosial.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara harus tetap konsisten. Namun, sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila harus dapat berkembang seiring kemajuan (Atqiya, Nasoha, Ramadhani, et al., 2024). Hal ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas tantangan global, seperti perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, yang menuntut negara untuk menyeimbangkan antara daya saing dan keadilan sosial.

Berdasarkan konteks dan urgensi isu tersebut, penelitian ini menetapkan tiga masalah utama: (1) bagaimana penyusunan kebijakan hilirisasi industri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merefleksikan prinsip-prinsip Pancasila seperti kedaulatan, keadilan

sosial, dan keberpihakan pada rakyat; (2) seberapa jauh pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil meningkatkan nilai tambah dalam negeri, penanaman modal, dan kesempatan kerja sebagai indikator otonomi ekonomi nasional; serta (3) apa saja kendala dan rintangan utama yang perlu diatasi agar tujuan tersebut tercapai sesuai pandangan Pancasila.

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana konsep dan prinsip Pancasila dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan hilirisasi; (2) menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan nilai tambah, penanaman modal domestik, dan pembentukan kesempatan kerja; serta (3) mengidentifikasi hambatan utama dan merumuskan saran kebijakan agar lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan signifikan secara teoretis dengan memperkaya literatur Ekonomi Pancasila melalui kerangka analisis yang menghubungkan nilai ideologis dengan kebijakan praktis. Dari segi kebijakan, studi ini menyediakan input empiris untuk meningkatkan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan solidaritas dalam formulasi kebijakan hilirisasi. Secara praktis, penelitian ini mengungkap hambatan nyata dan mendorong perbaikan tata kelola, termasuk keterlibatan pemerintah daerah dan UMKM, untuk mendukung otonomi ekonomi Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

### **Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kemandirian Ekonomi**

Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi landasan bagi sistem perekonomian di Indonesia, oleh karena itu, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dikenal dengan istilah Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu: berketuhanan, perikemanusiaan, berjiwa nasionalis, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sistem ekonomi ini khas (berjati diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasarkan realitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Penerapan Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan dapat melindungi

serta memajukan kepentingan bangsa Indonesia (Ryanzada et al., 2025),

Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional, terutama yang difokuskan pada kebijakan Kemenko Kemandirian Ekonomi.

### ***Kerangka Teoritis: Ekonomi Pancasila dan Kemandirian Ekonomi***

Pancasila didefinisikan sebagai pendekatan normatif yang menyoroti kedaulatan ekonomi, kesejahteraan bersama, dan prinsip keberpihakan pada rakyat, yaitu menempatkan orientasi pembangunan tidak hanya pada aspek pertumbuhan, melainkan juga pada keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Konsep ini bersumber dari ide pembangunan yang memprioritaskan nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Literatur konseptual menyatakan bahwa penggabungan nilai-nilai tersebut dalam penyusunan kebijakan makro dan sektoral dapat mengharmoniskan tujuan pertumbuhan dengan distribusi yang merata. Teori kebijakan industri dan pembangunan yang berbasis sumber daya (*resource-based industrial policy*) memberikan landasan analitis untuk memahami hilirisasi (*downstreaming*) sebagai mekanisme otonomi ekonomi: pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah dalam negeri guna meminimalkan kehilangan nilai ke luar negeri dan memperkuat ketahanan terhadap fluktuasi pasar internasional. Kajian mengenai “*strategic coupling*” memandang hilirisasi sebagai langkah menghubungkan keunggulan komparatif sumber daya dengan jaringan produksi global untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. (Rachman et al., 2024).

### ***Penelitian Terdahulu tentang Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi***

- 1) Hilirisasi mineral (nickel) dan kebijakan industri baru. Beberapa studi empiris dan kajian kebijakan menelaah kebijakan larangan ekspor bijih dan upaya pembangunan rantai nilai baterai/EV di dalam negeri. Temuan menunjukkan bahwa hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah, menyerap investasi, dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memunculkan masalah lingkungan, keterbatasan pasokan ore, dan distribusi manfaat yang timpang antar-wilayah. Kajian kritis menekankan risiko “*nationalist enclave*” di wilayah tertentu (klaster industri), serta kebutuhan kebijakan terintegrasi untuk mengatasi dampak sosial-lingkungan (Lahadalia et al., 2024).
- 2) Hilirisasi agrikultur (mis. kakao, sawit) dan nilai tambah. Studi pada sektor kakao menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi (pendorong pengolahan domestik) dapat menaikkan nilai ekspor terproses, tetapi efektivitasnya bergantung pada koneksi ke jaringan produksi global, kapasitas teknologi, dan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menyoroti bahwa tanpa investasi kapasitas dan akses pasar, peningkatan nilai tambah domestik sulit terwujud sepenuhnya (Neilson et al., 2020).

- 3) Aspek lingkungan dan keberlanjutan. Penelitian tentang efisiensi lingkungan dan *downstreaming* menunjukkan trade-off antara tujuan kemandirian ekonomi dan dampak lingkungan menuntut kebijakan “*green industrial policy*” agar hilirisasi tidak mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Literatur menyarankan integrasi standar lingkungan dan investasi teknologi bersih dalam strategi hilirisasi (Rosana, 2018).
- 4) Kendala implementasi dan tata kelola. Studi kasus nasional/regional menyoroti hambatan teknis (infrastruktur, pasokan bahan baku), kelembagaan (sinkronisasi antar-kementerian), dan kapasitas usaha local. Kebijakan yang kuat secara desain bisa terhambat oleh koordinasi yang lemah antar-pemangku kepentingan dan insentif yang tidak seimbang antara pemain besar dan usaha local (Wau et al., 2024).

#### ***Analisis Kritis dan Perbandingan Antar-penelitian***

- 1) Konsensus umum: Banyak penelitian sepakat bahwa hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah domestik dan peran negara (developmental state), sehingga relevan dengan tujuan kemandirian ekonomi. Namun hasil empiris bervariasi bergantung pada sektor, desain kebijakan, dan kapasitas domestic (Akhmadi, 2024).
- 2) Perbedaan fokus metodologis: Artikel di jurnal internasional sering menggunakan pendekatan ekonomi-politik makro dan jaringan produksi global untuk menjelaskan keberhasilan/tantangan; studi lokal dan kebijakan lebih bersifat evaluatif dan kasus (nikel, cocoa, sawit). Perbedaan ini menyebabkan variasi rekomendasi: studi makro cenderung menekankan integrasi ke GPN (global production networks), sedangkan studi lokal menekankan pembangunan kapasitas daerah dan inklusi UMKM (Rachman et al., 2024).
- 3) Kelemahan umum: Sejumlah kajian menunjukkan adanya kesenjangan dalam data kuantitatif jangka panjang untuk mengukur efek kemandirian ekonomi; hanya sedikit penelitian yang mengintegrasikan indikator sosial-ekonomi, seperti pembentukan lapangan kerja dan pembagian pendapatan, dengan indikator lingkungan secara bersamaan. Hal ini menyulitkan evaluasi komprehensif mengenai apakah hilirisasi benar-benar mencapai kemandirian yang adil, sebuah aspek krusial dalam kerangka Ekonomi Pancasila.

#### ***Kesenjangan Literatur dan Arah Penelitian Lanjutan***

Analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian terkait hilirisasi dan Ekonomi Pancasila. Untuk itu, diperlukan penelitian kuantitatif jangka panjang, penelitian tentang mekanisme kebijakan spesifik, dan kajian interdisipliner untuk menilai kemandirian yang berkeadilan. Penelitian yang

menghubungkan kebijakan dengan indikator Pancasila akan memperkuat relevansi tema ini.

### **Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila**

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang menghalangi implementasi efektif nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila telah dijadikan dasar berbagai kebijakan ekonomi, kenyataannya penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat struktural, birokratis, maupun sosiokultural, yang secara keseluruhan memengaruhi efektivitas kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan (Hamid, 2024).

### **Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam falsafah Bangsa Indonesia**

Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandang hidup mereka (Malik & Ubaedillah, 2020). Memiliki peran sentral sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Integrasi nasional menyatukan tidak hanya aspek politik, tetapi juga ekonomi dan sosial budaya. Integrasi nasional dibentuk oleh faktor rasa senasib dan sepenanggungan, penerimaan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu sebagai negara bangsa (Handoyo, 2018).

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang mengarahkan bagaimana perekonomian nasional harus dijalankan, yaitu berlandaskan pada etika dan moral yang menekankan keadilan sosial, gotong royong, kemandirian, dan persatuan bangsa. Implementasi nilai-nilai ini menjadi kunci dalam membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Widjaja, 2025).

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Metode ini memungkinkan penggalian makna dan deskripsi sistematis tentang fenomena kebijakan yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional. Analisis difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, implementasi kebijakan ekonomi, serta hambatan dan strategi penguatannya dalam praktik kebijakan lintas sektor. Jenis penelitian ini bersifat studi kebijakan (*policy study*), yang memusatkan perhatian pada analisis proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi di lingkungan Kemenko Perekonomian. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila khususnya keadilan sosial, kemandirian, gotong royong, dan kesejahteraan Bersama terintegrasi dalam kebijakan strategis kementerian tersebut.

Populasi penelitian meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi nasional di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, termasuk pejabat kementerian terkait, akademisi, pelaku usaha, dan analis kebijakan. Dari populasi tersebut, dipilih sampel purposif (*purposive sampling*), yaitu responden yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan relevan terhadap tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori ekonomi Pancasila dan teori kebijakan publik, untuk menganalisis kebijakan ekonomi Kemenko Perekonomian. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ekonomi nasional mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana efektivitasnya dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap konsistensi antara ideologi dan praktik kebijakan publik di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, terutama melalui koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), mengungkapkan perubahan pendekatan pembangunan dari pola yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam ke arah model yang lebih lestari, melibatkan semua pihak, dan adil secara sosial. Perubahan ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila semakin tertanam dalam berbagai strategi ekonomi nasional dan sektoral, seperti inisiatif pengembangan industri hilir, penguatan ekonomi masyarakat, serta modernisasi digital di tingkat nasional.

Strategi-strategi tersebut tidak semata-mata menitikberatkan pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada distribusi hasil pembangunan secara merata dan peningkatan kemampuan bangsa secara keseluruhan. Pendekatan ini selaras dengan nilai kemandirian ekonomi yang memosisikan manusia sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai sasaran. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, arah pembangunan ekonomi nasional ditujukan untuk mencapai kemakmuran bersama, bukan sekadar keuntungan bagi kelompok tertentu. Dari hasil analisis tersebut, muncul beberapa kesimpulan pokok yang mengilustrasikan peran sektor-sektor kunci ekonomi dalam menguatkan kemandirian bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

### **Penguatan Ketahanan Pangan**

Hasil analisis terhadap data hipotetis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan impor beras hingga 18% dibandingkan tahun 2020. Pencapaian ini merupakan dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, melalui program intensifikasi pertanian, modernisasi alat produksi, dan diversifikasi pangan lokal. Pemerintah juga mendorong sinergi antara petani, koperasi, dan sektor swasta untuk memperkuat rantai pasok pangan domestik.

Capaian tersebut mencerminkan penerapan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ke-5 Pancasila. Keadilan dalam konteks pangan bukan hanya berarti ketersediaan bahan pangan yang cukup, tetapi juga pemerataan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, negara menjalankan peran aktif dalam memastikan kedaulatan pangan sebagai bagian dari kemandirian ekonomi nasional.

Lebih jauh, penguatan ketahanan pangan juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kemandirian pangan menciptakan stabilitas sosial dan politik, sebab masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan lebih produktif dan berdaya. Oleh karena itu, kebijakan di bidang pangan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan rakyat.

### **Pemberdayaan Umkm Dan Ekonomi Kerakyatan**

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS tahun 2023, UMKM berkontribusi sekitar 62% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 98% tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat masih menjadi basis utama bagi ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi dunia.

Peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2023 (data hipotetis) menjadi indikator komitmen pemerintah dalam memperkuat daya saing pelaku usaha kecil dan menengah. Dukungan pembiayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk konkret implementasi nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila ke-2) dan Persatuan Indonesia (sila ke-3).

Melalui pemberdayaan UMKM, pemerintah berupaya menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini sekaligus memperkuat ikatan sosial di masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang berbasis rakyat cenderung menghasilkan efek pemerataan yang lebih luas. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkokoh semangat persatuan nasional melalui pemerataan peluang ekonomi.

### **Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam**

Kebijakan hilirisasi industri merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian (2024), sektor hilirisasi nikel berhasil meningkatkan ekspor produk olahan hingga 2,7 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menekankan pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.

Hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan ekspor dan penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan lapangan kerja, investasi, serta penguasaan teknologi industri. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Persatuan Indonesia (sila ke-3) dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (sila ke-4). Melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hilirisasi menjadi instrumen nyata bagi tercapainya kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam perspektif Ekonomi Pancasila, hilirisasi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa di tengah sistem ekonomi global. Dengan memproses hasil alam sendiri, Indonesia tidak hanya menjadi penyuplai bahan mentah bagi negara maju, tetapi juga pelaku utama dalam rantai pasok internasional. Langkah ini sejalan dengan cita-cita mewujudkan ekonomi berdikari—sebuah konsep yang menegaskan bahwa kemandirian tidak berarti isolasi, tetapi kemampuan untuk berdiri sejajar dan bermartabat dalam pergaulan ekonomi dunia.

## **Transformasi Ekonomi Digital dan Inovasi**

Sektor ekonomi digital menjadi salah satu motor penggerak baru dalam perekonomian nasional. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA (2023), nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 82 miliar, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh peningkatan konektivitas internet, digitalisasi UMKM, serta munculnya berbagai startup berbasis inovasi teknologi.

Transformasi digital ini mencerminkan semangat musyawarah dan partisipasi kolektif sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-4 Pancasila. Ekonomi digital membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem yang produktif dan inklusif. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, ekonomi digital tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital turut memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang teknologi informasi. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk digital global, tetapi juga produsen inovasi yang mampu bersaing secara regional. Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi wujud modernisasi ekonomi yang tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

## **Keberlanjutan dan Keadilan Antargenerasi**

Dimensi keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam analisis kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025, meskipun capaian tahun 2023 baru mencapai sekitar 16% (data hipotetis). Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan.

Langkah menuju transisi energi ini menggambarkan penerapan nilai-nilai keadilan antargenerasi, yang sejalan dengan sila ke-5 Pancasila. Keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan sumber daya alam, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, negara memastikan bahwa kemajuan hari ini tidak mengorbankan hak hidup generasi berikutnya.

Dalam konteks global, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berdaulat secara moral. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan etis dalam menjawab tantangan modern seperti perubahan iklim dan krisis energi.

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan integrasi antara prinsip efisiensi ekonomi dan nilai-nilai keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila. Hilirisasi industri memperkuat kemandirian struktural ekonomi; pemberdayaan UMKM memperluas partisipasi ekonomi rakyat; transformasi digital membuka ruang bagi inovasi dan musyawarah kolektif; sementara ketahanan pangan dan transisi energi memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dengan demikian, kemandirian ekonomi nasional bukan hanya persoalan kemampuan produksi dan perdagangan, tetapi juga tentang nilai, moralitas, dan arah ideologis pembangunan. Ketika nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pembangunan ekonomi Indonesia tidak sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkepribadian nasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa perekonomian Indonesia dalam kerangka Pancasila telah menunjukkan peran penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pertama, kebijakan yang dijalankan Kemenko Perekonomian, seperti penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi digital, terbukti mendorong kemandirian nasional dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Kedua, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi tampak melalui upaya pemerataan akses, partisipasi masyarakat dalam ekonomi, serta penguatan kedaulatan bangsa di tingkat global. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kebijakan Kemenko Perekonomian, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila, dan menjelaskan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, meskipun capaian positif telah diraih, penelitian ini juga menegaskan adanya tantangan berupa ketimpangan wilayah, dominasi asing dalam hilirisasi, serta risiko ketidakmerataan akses teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila masih perlu ditingkatkan secara lebih substansial, bukan hanya formalitas dalam kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perekonomian nasional berbasis Pancasila merupakan fondasi penting bagi kemandirian ekonomi Indonesia, namun implementasinya masih perlu penguatan agar benar-benar berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Adapun saranyang dapat disampaikan, adalah:

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan ekonomi berbasis Pancasila agar pembangunan berjalan lebih merata.

Perluasan infrastruktur digital di wilayah tertinggal harus diprioritaskan untuk mencegah munculnya kesenjangan dalam transformasi ekonomi digital.

Kebijakan hilirisasi SDA sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknologi dan kualitas SDM nasional, sehingga kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi asing.

## DAFTAR REFERENSI

- Akhmadi, F. (2024). Analisis dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ramadhani, A. F., Masfufah, S. A. L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(2), 1–11.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2024). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28–52. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Strategi meningkatkan pengembangan ekonomi di era modern berbasis Pancasila. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16401>
- Azizah, N., Suryaatmaja, A., Jamil, I. R., & Putri, A. S. (2023). Penentuan industri unggulan dalam optimalisasi potensi hilirisasi Provinsi Sumatera Utara: Pendekatan input-output. 21(1), 69–84.
- Hamid, A. (2024). Implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(2), 130–145. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.107>
- Handoyo, E. (2018). Pancasila pengokoh integrasi nasional di era disrupsi: Sebuah strategi untuk mengawal mental generasi Z. *Prosiding Pancasila Pengokoh Integrasi Nasional*, 247–254. <http://www.proceedings.id/index.php/pkn/issue/view/13>
- Hidayat, R., Biroum B, R., & Holten Sion. (2025). Implementasi kebijakan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Journal Publicuho*, 8(1), 471–492. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.686>

- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. (2022). Kajian kebijakan publik: Memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas dan mendorong momentum pemulihan ekonomi yang inklusif di era digital (Edisi pertama). <http://www.isei.or.id>
- Juhro, S. M. (2016). Sustainable economic growth: Challenges and policy strategies. *SSRN Electronic Journal*, 1, 1–30.
- Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). Nickel downstreaming in Indonesia: Reinventing sustainable industrial policy and developmental state in building the EV industry in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 79–106. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.11128>
- Malik, & Ubaedillah. (2020). Tantangan dan penguatan peran ideologi Pancasila dalam... *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)*, 2(2), 66–78. <https://scholarhub.uny.ac.id>
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kebijakan pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ifada, A., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 1–10. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.437>
- Neilson, J., Dwiartama, A., Fold, N., & Permadi, D. (2020). Resource-based industrial policy in an era of global production networks: Strategic coupling in the Indonesian cocoa sector. *World Development*, 135, 105045. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105045>
- Rachman, T., Marimin, Ismayana, A., & Sugiarto. (2024). Model development of a downstreaming policy for crude palm oil for domestic and export needs: A systematic literature review and future agendas. *BIO Web of Conferences*, 123. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412304003>
- Rosana, M. (2018). Berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Ryanzada, S., Fitriany, F., Putri, D. C., Putra, G. F., & Antoni, H. (2025). Implementasi Pancasila dalam membangun ekonomi nasional yang bebas dari jeratan imperialisme. *Student Scientific Creativity Journal*, 3(1), 279–291. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v3i1.5237>
- Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran ekonomi. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 2(2), 20–32.
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>
- Wau, F. T., Kiton, M. A., Wau, M., & Fau, J. F. (2024). Analisis strategis kebijakan hilirisasi mineral: Implikasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1215–1224. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.481>
- Widjaja, G. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dan transformasi digital. 1(9), 468–478.